



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNA TRININGSIH
2. Jabatan : PENELITI MUDA
3. NHK : 142260

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 319.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/45 m2 di PERUMAHAN PURI SELEBRITI RT. RW. Kode Pos. 29466, [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 209.600.000
2. Tanah Seluas 580 m2 di INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 174.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2008, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 17.865.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 57.549.815

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 21.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 590.514.815

III. HUTANG

Rp. 188.563.344

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 401.951.471

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.